

## **PENDAMPINGAN KELENGKAPAN ORGANISASI DAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA KOPERASI BAITUL MAL WATAMWIL (BMT) PUNGGUR INTI SEJAHTERA KECAMATAN PUNGGUR**

**Fitriani<sup>1)</sup>, Sutarni<sup>1)</sup>, Dayang Berliana<sup>1)</sup>, Evi Yuniarti<sup>2)</sup>, Cholid Fatih<sup>3)</sup> Sudiyo<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup>Agribisnis Pangan Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung

<sup>2)</sup>Akuntansi Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung

<sup>3)</sup>Agribisnis Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung

\*E-mail: [Fitriani@polinela.ac.id](mailto:Fitriani@polinela.ac.id)

### **ABSTRAK**

PKM dilaksanakan pada Koperasi BMT Punggur Inti Sejahtera bertempat di Desa Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra, justifikasi prioritas yang disepakati dengan mitra untuk mendapatkan solusi adalah: meningkatkan pengetahuan tentang kelengkapan organisasi koperasi (AD/ART dan badan hukum) dan praktik penerapan prinsip syariah, serta meningkatkan keterampilan penyusunan laporan keuangan koperasi. Memberikan rasa aman dan ketenangan jiwa melalui transaksi secara syariah bagi pengurus dan anggota koperasi, sehingga pendapatan yang diterima halal dan baik bagi anggota dan pengurus koperasi. Membantu meningkatkan kapasitas usaha anggota koperasi melalui peningkatan kemampuan manajerial dalam pelayanan usaha dengan menggunakan penerapan prinsip syariah. Target yang diharapkan dari kegiatan PKM adalah: 1) Meningkatnya pengetahuan kelengkapan organisasi koperasi dan prinsip syariah bagi pengurus dan anggota koperasi, 2) Meningkatnya keterampilan praktik penyusunan AD/ART dan pengajuan badan hukum koperasi 3) Meningkatnya kemampuan administrasi transaksi syariah bagi pengurus koperasi dan anggota koperasi dan 4) Meningkatnya keterampilan penyusunan laporan keuangan bagi pengurus koperasi. Khalayak sasaran adalah anggota dan pengurus koperasi sebanyak 23 orang. Metode PKM yang dilakukan meliputi beberapa tahap, yaitu penyuluhan kelengkapan organisasi dan penerapan prinsip syariah pada koperasi, praktik penyusunan AD/ART dan persyaratan pengajuan badan hukum koperasi, praktik penerapan prinsip syariah pada usaha koperasi, dan pelatihan penyusunan laporan keuangan koperasi. Luaran kegiatan adalah: a) Draft AD/ART dan persyaratan pengajuan badan hukum koperasi. b) Formulir akad transaksi keuangan usaha koperasi secara syariah, b) Laporan transaksi keuangan, rugi laba, dan posisi keuangan koperasi.

**Kata kunci:** koperasi, prinsip syariah, AD/ART, laporan keuangan

### **ASSISTANCE OF ORGANIZATIONAL COMPLETENESS AND APPLICATION OF SHARIA PRINCIPLES IN THE BAITUL MAL WATAMWIL COOPERATIVE (BMT) PUNGGUR INTI SEJAHTERA, PUNGGUR DISTRICT**

### **ABSTRACT**

*Community services were carried out at the Punggur Inti Sejahtera BMT Cooperative located in Sidomulyo Village, Punggur District, Central Lampung Regency. Based on the problems faced by partners, the priority justifications agreed with partners for solutions are increasing knowledge about the completeness of cooperative organizations (Statutes and bylaws, legal entities) and the practice of applying sharia principles to improve cooperative financial reporting skills. Provide security and peace of mind through transactions in sharia for the management and cooperative members so that the income received is lawful and good for the members and management. They are helping to increase the business capacity of cooperative members through increasing managerial ability in business services by applying sharia principles. The expected targets of PKM activities are: 1) Increased knowledge of the completeness of cooperative organization and sharia principles for cooperative management and members, 2) Improved skills in the practice of drafting AD/ART and filing for cooperative legal entities, 3) Increased ability of sharia transaction administration for cooperative*

*management and members cooperatives and 4) Increased skills in preparing financial reports for cooperative management. The target audience is 23 members and the management of the cooperative. The PKM method carried out includes several stages, namely counseling on organizational completeness and the application of sharia principles to cooperatives, the practice of drafting AD/ART and the requirements for filing cooperative legal entities, the practice of applying sharia principles to cooperative businesses, and training in the preparation of cooperative financial reports. Activity outputs are a) Draft statutes, bylaws, and requirements for filing a combined legal entity. b) Cooperative financial transaction contract form according to sharia, b) Financial transaction report, profit and loss, and cooperative financial position.*

**Keywords:** *cooperatives, sharia principles, Statutes and bylaws, financial statements*

**Disubmit :** 30 Agustus 2021; **Diterima :** 14 Februari 2022; **Disetujui :** 29 April 2022

## **PENDAHULUAN**

Koperasi *Baitul Mal Watamwil* (BMT) Punggur Inti Sejahtera bertempat di Desa Sidomulyo Kecamatan Punggur sepakat didirikan pada tanggal 23 Maret 2016 lalu. Rapat pendirian dihadiri oleh 23 anggota dengan latar belakang petani progresif dengan pengalaman sebagai pengurus kelompok tani dan Gapoktan di Kecamatan Punggur. Rapat pendirian menghasilkan kesepakatan terbentuknya kepengurusan koperasi. Ketua yang terpilih adalah Bapak Arifianto, sekretaris Bapak Eko Budiman, dan bendahara Bapak M. Jalaludin. Penyertaan modal anggota sebesar Rp 3.000.000,- per anggota. Pada saat ini, dana yang dikelola sebesar Rp 60.460.000,-

Koperasi BMT Punggur Inti Sejahtera merupakan lembaga koperasi baru, kelembagaan yang terbentuk belum memiliki kelengkapan organisasi koperasi sesuai dengan UU No. 25 tahun 1999 tentang perkoperasian, yaitu Rapat Anggota, Pengurus, dan Badan Pengawas. Administasi organisasi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), keuangan, dan legal pendirian koperasi juga belum tersedia.

Kepengurusan baru penting untuk melakukan konsolidasi internal untuk meningkatkan partisipasi dan kerjasama anggotanya. Kelembagaan baru memiliki aturan main (*rule*) yang tertuang dalam AD/ART. Koperasi BMT Punggur Inti Sejahtera perlu mempersiapkan penyusunan AD/ART. Selain itu, juga perlu menyiapkan izin pendirian badan hukum koperasi sebagai asas legal formal beroperasinya koperasi.

Koperasi BMT Punggur Inti Sejahtera merupakan bentuk koperasi yang berlandaskan syariah Islam. Prinsip syariah merupakan hal terpenting untuk kebersihan asal pendapatan usaha koperasi. Prinsip syariah menjadi prasyarat halal dan syahnya akad pembiayaan/investasi yang dilakukan. Hal ini merupakan kunci penerapan ekonomi Islam pada proses transaksi. Namun sebagai lembaga permodalan baru berbasis syariah, tingkat pengetahuan tentang prinsip syariah usaha koperasi pengurus dan anggota belum memadai. Pemahaman tentang prinsip syariah dalam praktik akad pembiayaan menjadi fundamental dan perlu dilakukan (BSM Cab. Lampung, 2008; Dewi, 2005).

Koperasi BMT Punggur Inti Sejahtera sangat membutuhkan informasi tentang praktik penerapan prinsip syariah dalam aktivitas usaha koperasi, sehingga setiap aktivitas transaksi didasarkan secara benar dan syar'i. Tingkat keterampilan penerapan prinsip syariah dalam operasional usaha yang belum memadai akan dapat menghambat laju operasional usaha. Tingginya apresiasi anggota terhadap penerapan praktik pembiayaan syariah merupakan kebutuhan mendesak yang harus dilakukan. Oleh karena itu, kemampuan keterampilan penerapan praktik transaksi syariah bagi pengurus dan anggota koperasi sangat penting dilakukan.

Aktivitas pencatatan dan pelaporan keuangan saat ini masih menggunakan pembukuan sederhana, berupa arus kas keluar dan kas masuk. Hal ini menyebabkan rekapitulasi informasi piutang dan pembiayaan sulit dilakukan. Aktivitas pelaporan keuangan menjadi mendesak untuk dilakukan. Selain untuk tujuan akuntabilitas, transparansi, juga

sebagai wujud tanggung jawab moral pengurus untuk menerapkan prinsip keuangan syariah secara benar.

Pengembangan sektor pertanian tidak dapat dilepaskan dari dukungan lembaga keuangan dan perbankan. Hingga saat ini, lembaga keuangan perbankan di Kecamatan Punggur hanya ada satu lembaga bank umum (BRI) dan satu bank perkreditan rakyat. Sementara lembaga keuangan mikro yang ada dalam bentuk koperasi baru ada sebanyak 19 unit dengan jenis usaha simpan pinjam. Keberadaan lembaga keuangan yang ada tersebut masih belum memadai dalam melayani 10.026 rumah tangga pertanian yang tersebar di 9 kampung (BPS Lampung Tengah 2019). Salah satu upaya meningkatkan keterlibatan petani dalam penyediaan akses pembiayaan dan permodalan usaha pertanian adalah memiliki lembaga keuangan mikro agribisnis secara swakarsa. Lembaga keuangan mikro pertanian swakarsa yang berperan penting dalam pembangunan pertanian adalah koperasi. Kapasitas kelembagaan pertanian yang kuat dapat menjadi pionier terwujudnya kelembagaan ekonomi perdesaan dalam bentuk koperasi pertanian (Fitriani, 2014).

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berperan secara luas dalam meningkatkan kapasitas usaha. Melalui lembaga koperasi, petani dapat memenuhi tuntutan pasar seiring terjadinya transisi praktik pertanian tradisional ke pertanian komersial (Suli et al. 2013). Pengembangan usaha agribisnis skala kecil perlu koperasi. Tanpa koperasi, tidak memungkinkan agribisnis kecil dapat berkembang menghadapi pengusaha besar (Fitriani et al., 2014; Fitriani, 2015; Fitriani et.al., 2017). Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk 1) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelengkapan organisasi (AD/ART) dan badan hukum koperasi. 2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penerapan prinsip syariah usaha koperasi. 3) Meningkatkan keterampilan penyusunan laporan keuangan koperasi.

## METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang telah disepakati bersama mitra. Solusi yang ditawarkan kepada mitra dapat dilihat pada Tabel 1. Metode PKM dan prosedur kerja diadaptasi dari Fitriani Fitriani et al. (2014).

Tabel 1. Justifikasi masalah dan solusi penyelesaiannya

Permasalahan	Solusi yang ditawarkan	Metode
Tingkat pengetahuan dan keterampilan kelengkapan organisasi (AD/ART) koperasi dan pengajuan badan hukum (aspek legal) belum memadai.	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kelengkapan organisasi (AD/ART) koperasi dan pengajuan badan hukum (aspek legal)	Ceramah, praktik penyusunan draft AD/ART dan pendampingan pengajuan badan hukum koperasi
Tingkat pengetahuan dan keterampilan penerapan prinsip syariah usaha koperasi belum memadai.	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan penerapan prinsip syariah pada usaha koperasi	Ceramah, praktik, dan simulasi kelengkapan administrasi transaksi syariah
Tingkat keterampilan penyusunan laporan keuangan masih rendah.	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan penyusunan laporan keuangan koperasi	Pelatihan dan praktik studi kasus penyusunan laporan keuangan

## Prosedur kerja

1. Tahap pertama dilakukan pendekatan terhadap pengurus terkait rencana jadwal pelaksanaan kegiatan PKM yang telah disepakati. Khalayak sasaran dari kegiatan PKM adalah pengurus dan anggota Koperasi BMT Punggur Inti Sejahtera. Jumlah anggota

- dan pengurus koperasi sebanyak 23 orang. Kegiatan PKM akan dilakukan di Desa Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.
2. Tahap kedua adalah melakukan kegiatan penyuluhan kelengkapan organisasi koperasi. Kegiatan penyuluhan kelengkapan organisasi koperasi menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan menggunakan alat bantu LCD dan modul materi penyuluhan. Materi kelengkapan penyusunan AD/ART dilanjutkan dengan praktik penyusunan draft AD/ART koperasi dan persiapan kelengkapan buku administrasi koperasi. Pada tahap lanjut akan dilakukan pendampingan tahapan pengajuan badan hukum koperasi.
  3. Tahap ketiga dilakukan penyuluhan prinsip dan jenis-jenis layanan jasa secara syariah, dilanjutkan dengan praktik administrasi transaksi syariah. Metode latihan penyelesaian kasus digunakan untuk praktik penerapan prinsip syariah. Praktik dimulai dari penyiapan formulir akad, doa pada waktu akad berlangsung, penyelesaian akad pembiayaan, hingga penentuan bea ujuh yang ditetapkan. Pendampingan langsung terhadap peserta dilakukan melalui metode simulasi dan latihan contoh akad dan pengisiannya.
  4. Kegiatan keempat adalah kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan. Kegiatan ini dilakukan setelah satu bulan dari kegiatan penyuluhan prinsip syariah. Peserta kegiatan adalah pengurus koperasi. Peningkatan pengetahuan dan pembimbingan secara intensif kepada bendahara koperasi mulai dari proses pencatatan, pengelompokan, penjurnalan, laporan posisi keuangan/neraca, laporan rugi laba (SHU), dan laporan distribusi SHU. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang merupakan informasi keuangan suatu badan usaha dan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK) laporan yang wajib dibuat oleh perusahaan adalah Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Neraca dan Laporan Arus Kas.
  5. Tahap kelima (akhir) adalah evaluasi keberlanjutan program dilakukan dengan tujuan untuk menyiapkan rencana pengembangan organisasi koperasi di masa yang akan datang. Satu bulan setelah kegiatan PKM akan dilakukan kunjungan audensi untuk melihat tingkat capaian dan penerapan aktivitas PKM yang diberikan. Berbagai kondisi tingkat penerapan dan hambatan yang ditemui akan menjadi dasar perencanaan program yang akan datang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan PKM diawali dengan kegiatan pertemuan pendahuluan. Kegiatan ini adalah pertemuan awal antara Tim PKM dan Badan Pengurus Koperasi Punggur Inti Sejahtera terkait pelaksanaan agenda kegiatan PKM. Pertemuan pendahuluan menyepakati jadwal pelaksanaan kegiatan PKM inti. Topik utama penyuluhan meliputi: kelengkapan administrasi organisasi koperasi, prinsip dan penerapan syariah pada koperasi; dan penyusunan laporan keuangan koperasi. Pertemuan juga menyepakati waktu untuk pendampingan penyusunan laporan keuangan dan AD/ART koperasi.

Partisipasi Mitra PKM sangat penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian target dan luaran PKM. Mitra PKM telah bekerja sama dan berperan aktif pada waktu penyusunan rencana kegiatan PKM. PKM ini dibuat berdasarkan usulan dari Mitra. Mitra sangat memerlukan pengetahuan dan keterampilan kelengkapan organisasi koperasi dan penerapan prinsip syariah untuk koperasi baru mereka. Mitra telah menjalin komunikasi secara baik dan terus terlibat mulai dari tahap perencanaan usulan sampai dengan pelaksanaannya. Diskusi intensif Tim PKM dengan Mitra dilakukan pada setiap kesempatan. Mitra PKM yang mengikuti dan berpartisipasi aktif dapat memperkuat kemandirian dalam menyelesaikan persoalan usaha yang dikelolanya. Dengan demikian *outcome* berupa peningkatan pendapatan dan kemandirian koperasi dapat tercapai. Partisipasi mitra menjadi kunci keberhasilan pencapaian target luaran kegiatan PKM ini.

### **Penyuluhan kelengkapan organisasi (AD/ART) koperasi**

Kegiatan penyuluhan kelengkapan organisasi dilakukan bertempat di kediaman ketua koperasi Desa Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan ini diberikan oleh Ir. Cholid Fatih. Peserta utama terdiri dari pengurus dan pengawas dan sebagian anggota koperasi. Terdiri dari badan pengurus koperasi (ketua, bendahara, dan sekretaris), badan pengawas (ketua, bendahara, dan sekretaris), dan anggota aktif (4 orang). Metode ceramah dan diskusi dilakukan dengan menggunakan alat bantu LCD pada kegiatan penyuluhan tema ini. Modul materi control draft AD/ART koperasi menjadi materi simulasi penyusunan AD/ART koperasi.

Alat kelengkapan organisasi koperasi terdiri dari tiga unsur yaitu, Rapat Anggota Tahunan (RAT), Pengurus Koperasi, Pengawas Koperasi dan bila memungkinkan dapat mengangkat Manajer Koperasi (UU No.25/1992). Koperasi Punggur Inti sejahtera telah memiliki pengurus dan pengawas koperasi yang dipilih oleh anggota melalui RAT pada awal pendirian koperasi.

Alat perlengkapan koperasi adalah pilar-pilar yang akan menentukan maju mundurnya koperasi. Pengurus adalah pelaksanaan usaha koperasi yang bertanggungjawab kepada rapat anggota. Pengawasan adalah orang yang mengadakan pengawasan terhadap kebijakan pengurus dan dapat di beri saran demi kemajuan ekonomi. Kelengkapan organisasi yang penting selanjutnya adalah Bidang Organisasi dan Menejemen. Bidang ini bertanggung jawab meneliti catatan yang ada pada buku-buku yang diselenggarakan oleh koperasi. Buku administrasi koperasi terdiri dari: 1) Buku Daftar Anggota; 2) Buku Daftar Pengurus; 3) Buku Daftar Anggota Pengawas; 4) Buku-buku catatan lainnya yang dapat memberikan informasi secara umum mengenai organisasi dan manajemen koperasi. Juga Bidang Usaha, Permodalan dan Keuangan. Pemeriksaan dibidang ini bertujuan untuk mengetahui bidang usaha yang dilakukan oleh koperasi didalam menjalankan fungsinya. Selanjutnya bertujuan untuk mengetahui jumlah modal koperasi serta dari mana modal itu diperoleh. Hal ini penting untuk menilai keluwesan (fleksibilitas) usaha koperasi dalam perkembangan keadaan ekonomi yang dapat berubah serta penting dalam melakukan analisis kekuatan dan kelemahan koperasi.

Selama proses pemaparan materi kelengkapan organisasi koperasi peserta penyuluhan secara interaktif mengajukan berbagai pertanyaan dan pernyataan. Sebagian peserta tertarik dengan bahasan keanggotan koperasi yang lebih terbuka dan memberikan akses pada masyarakat yang lebih luas. Pada aspek pengelolaan pengelolaan usaha koperasi peserta banyak memberikan masukan terkait jenis-jenis usaha yang akan dikelola koperasi di masa mendatang.

Materi dilanjutkan dengan mekanisme pengajuan legal formal badan hukum koperasi. Kegiatan ini diberikan oleh Sutarni, S.P., M.E.P. Setelah mendapatkan materi pengajuan legal formal koperasi selanjutnya dilakukan pembahasan AD/ART koperasi. Materi AD/ART mencakup, keanggotan, rapat anggota, pengurus dan pengawas koperasi, kesejahteraan, dan ketentuan lain-lain. Masing-masing dijelaskan dalam bagian bab dan pasal-pasal yang tertuang dalam AD/ART koperasi (Gambar 1).

Koperasi telah memiliki Akta Pendirian Koperasi Syariah Punggur Inti Sejahtera berdasarkan Akta Notaris Abadi Riyantini No. 14 tanggal 8 Agustus 2016. Selanjutnya dilakukan pendaftaran badan hukum koperasi. Berdasarkan kelengkapan syarat administrasi yang diperlukan, maka pengurus koperasi mengajukan izin badan hukum koperasi ke Dinas Koperasi Lampung Tengah. Dinas Koperasi Kabupaten Lampung Tengah melakukan penyuluhan tentang perkoperasian bagi koperasi baru pada tanggal 01 September 2016. Berdasarkan hasil audensi pada waktu kunjungan evaluasi, diketahui bahwa badan hukum koperasi Punggur Inti Sejahtera telah keluar. Koperasi Punggur Inti Sejahtera mendapatkan izin badan hukum dengan No. 002117/BH/M.KUKM.2/IX/2016 tanggal 17 September 2016.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan materi kelengkapan organisasi koperasi dan prinsip Syariah pada pengurus dan anggota Koperasi Punggur Inti Sejahtera

### **Penyuluhan Penerapan Prinsip Syariah dalam Transaksi Usaha Koperasi**

Kegiatan penyuluhan dengan topik penarapan prinsip syariah dalam transaksi usaha koperasi diberikan oleh Sudiyo, S.Ag., M.A. dan Evi Yuniarti, S.E., M.Si. sebagai pemateri. Pengenalan prinsip dan jenis-jenis layanan jasa koperasi secara syariah diberikan secara jelas. Materi juga dilengkapi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait produk-produk pembiayaan syariah.

Selama proses penyuluhan, beberapa peserta bertanya tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam akad transaksi. Kegiatan penyuluhan dilanjutkan dengan pelatihan penerapan praktik syariah. Praktik penerapan prinsip syariah dilakukan dengan metode latihan penyelesaian kasus. Mulai dari penyiapan formulir akad, doa pada waktu akad berlangsung, penyelesaian akad pembiayaan, hingga penentuan bea ujroh yang ditetapkan.

Penanggung jawab pada kegiatan penyusunan laporan keuangan adalah Fitriani, S.P., M.E.P. Kegiatan pelatihan secara intensif dilakukan melalui proses pembimbingan aktivitas sesuai siklus akuntansi. Aktivitas diawali dari proses pencatatan, pengelompokan, penjurnalan, laporan posisi keuangan/neraca, laporan rugi laba (SHU), dan laporan distribusi SHU. Bendahara dan administrasi keuangan koperasi dibimbing secara intensif sampai dapat melakukan sendiri proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan koperasi. Laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi yang menyediakan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan didalam pengambilan keputusan ekonomi. Berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK) laporan yang wajib dibuat oleh perusahaan adalah Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Neraca dan Laporan Arus Kas.



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan materi penyusunan laporan keuangan pada pengurus dan anggota Koperasi Punggur Inti Sejahtera

### Evaluasi PKM dan Pembahasan

Evaluasi keberhasilan kegiatan dilakukan berdasarkan basis indikator kinerja dan target luaran. Selain juga berdasarkan pengamatan selama proses kegiatan. Penilaian tingkat keaktifan peserta dalam memberikan pertanyaan dan umpan balik selama proses berlangsung juga menjadi indikator evaluasi proses kegiatan penyuluhan. Selama kegiatan penyuluhan dan advokasi prinsip syariah, peserta yang aktif bertanya adalah: Arifianto, Pitono, Eko, Budi, dan Jarot.

Tabel 2. Capaian Target Luarannya berdasarkan Indikator Kinerja

Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Base line	Target
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kelengkapan organisasi (AD/ART) koperasi dan pengajuan badan hukum (aspek legal)	Tingkat pengetahuan kelengkapan organisasi koperasi (20%) Draft AD/ART koperasi (belum ada) Badan Hukum koperasi (belum ada)	Tingkat pengetahuan kelengkapan organisasi koperasi (70%) Draft AD/ART koperasi (ada) Badan Hukum koperasi (ada)
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan penerapan prinsip syariah pada usaha koperasi	Tingkat pengetahuan prinsip syariah pada usaha koperasi (20%) Penerapan prinsip syariah pada administrasi transaksi keuangan (form berkas transaksi syariah 0%)	Tingkat pengetahuan prinsip syariah pada usaha koperasi (60%) Penerapan prinsip syariah pada administrasi transaksi keuangan (ketersediaan form akad, akad, ujuh, penentuan margin bagi hasil)
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan penyusunan laporan keuangan koperasi	Tingkat pengetahuan penyusunan laporan keuangan (40%) Penyusunan laporan keuangan ( arus kas)	Tingkat pengetahuan penyusunan laporan keuangan (80%) Laporan keuangan (Laporan arus kas, rugi laba dan perubahan modal, dan posisi keuangan)

Evaluasi keberlanjutan program dilakukan dengan tujuan untuk menyiapkan rencana pengembangan organisasi koperasi di masa yang akan datang. Setelah kegiatan PKM audiensi melalui media telekomunikasi dilakukan untuk melihat tingkat penerapannya dalam aktivitas operasional koperasi.

Pembentukan koperasi menjadi salah satu alternatif dalam menghadapi persoalan ekonomi masyarakat. Koperasi sendiri memiliki misi khusus dalam pendidikan bagi anggotanya. Adanya koperasi dapat membantu upaya pemberdayaan anggota dalam berbagai aspek usaha, mulai dari peningkatan kapasitas dan skala produksi, pembiayaan, kelembagaan, dan pemasaran usaha. Koperasi dapat memberikan jaminan kepastian pasokan input produksi, harga yang kompetitif, pembiayaan, hingga pasar yang lebih menguntungkan bagi anggota.

Keterlibatan anggota masyarakat dalam kelembagaan koperasi akan menguatkan institusi tersebut sebagai lembaga perekonomian pedesaan, dimana anggotanya akan memiliki posisi tawar yang kuat, sehingga kesejahteraan anggota mengalami peningkatan melalui peningkatan pendapatan (Suhartini et al. 2014; Baekhaki et al., 2018; Handayani et al., 2018). Lembaga ekonomi koperasi secara khusus fokus pada penguatan:

1. Akses permodalan usaha. Koperasi dapat mengelola mulai dari penyediaan sarana produksi hingga akses kesiapterapan teknologi produksi, dan peningkatan skala usaha dengan dukungan sumber permodalan.
2. Akses pasar yang jelas. Adanya koperasi memungkinkan penjualan hasil produksi anggota dapat dilakukan dalam skala bisnis dan kontinuitas yang lebih pasti untuk posisi tawar yang kuat dan lebih tinggi, dan berimplikasi pada harga jual yang tinggi dan bisnis yang berkelanjutan.
3. Hubungan kerjasama dengan koperasi lain akan membuka jaringan usaha baru bagi koperasi dan anggotanya.
4. Adanya pendidikan dan pelatihan bagi anggota mengenai aspek budidaya, manajemen usahatani, dan hal yang berkaitan dengan ekonmomi pertanian untuk kesejahteraan anggotanya
5. Peningkatan skala usaha ekonomi kelompok dengan adanya aktivitas ekonomi seperti usaha simpan pinjam, produksi, dan lain-lain.
6. Kebersamaan anggota yang semakin kuat karena memiliki tujuan yang sama yaitu kesejahteraan anggota koperasi.

Bentuk kelembagaan ekonomi yang ideal adalah koperasi atau kelompok usahatani, dengan tujuan awal untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Pemberdayaan petani dalam kelembagaan koperasi, merupakan suatu bentuk alternatif dari model pembangunan masyarakat pedesaan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar bermatapencarian sebagai petani/buruh tani. Koperasi dalam hal ini memberikan jaminan keuntungan bagi anggota baik dari segi sosial dan ekonomi, selain itu yang utama adalah peningkatan posisi tawar petani dapat ditingkatkan sehingga mereka mempunyai kekuatan untuk 'menentukan' harga produk pertaniannya.

Koperasi dalam jangka panjang akan memberikan pengetahuan dan pendidikan yang akan membangun petani-petani yang berorientasi pasar, serta dengan koperasi juga akan membangun petani dan masyarakat pedesaan yang memiliki kualitas sumberdaya manusia unggulan yang mencakup pada peningkatan keahlian dan keterampilan (bisnis dan organisasi), pengetahuan, dan pengembangan jiwa kewirausahaan petani itu sendiri. Sehingga dengan demikian, pemberdayaan ekonomi lokal yang berbasis pada pembangunan pertanian di perdesaan dapat berjalan dengan baik.

## **KESIMPULAN**

1. Kegiatan PKM meningkatkan kelengkapan organisasi koperasi (AD/ART) dan syarat pengajuan badan hukum koperasi. Tingkat pengetahuan kelengkapan organisasi koperasi meningkat (70%), dokumen AD/ART koperasi tersedia dan berhasil mendapatkan Badan Hukum Koperasi

2. Pengetahuan prinsip syariah dan penerapannya bagi pengurus dan anggota koperasi meningkat mencapai 60%. Penerapan prinsip syariah telah dilakukan pada administrasi transaksi keuangan (ketersediaan form akad, akad, ujroh, penentuan margin bagi hasil)
3. Tingkat pengetahuan penyusunan laporan keuangan (80%). Pengurus koperasi berhasil menyusun laporan keuangan (Laporan arus kas, rugi laba dan perubahan modal, dan posisi keuangan) secara akuntabel.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini terselenggara dengan sumber dana DIPA Polinela.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baekhaki, Khamid, Rilus A. Kinseng, and Endriatmo Soetarto. 2018. "Korporatisasi Garam Rakyat : Dinamika Transisi Sosial, Ekonomi Dan Ekologi Petambak Garam." *Sodality* 6 (1): 61–70.
- BPS Lampung Tengah. 2019. *PUNGGUR DALAM ANGKA Punggur in Figures 2019*. Gunung Sugih: BPS Lampung Tengah.
- Fitriani. 2015. "Gapoktan Capacity Institutionalization through Farmer Cooperative." *Jurnal Kebudayaan Masyarakat Dan Politik* 28 (2): 63–69. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/mkp.V28I22015.65-71>.
- Fitriani, Fitriani, Sudiyo, and Dayang Berliana. 2017. "Tingkat Partisipasi Anggota 'Koperasi Masjid' Dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat Di Kota Bandar Lampung." *Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian*, no. September: 307–12.
- Fitriani, Sutarni, Evi Yuniarti, and Cholid Fatih. 2014. "Koperasi Pertanian Sebagai Solusi Persoalan Ekonomi Masyarakat Pertanian Perdesaan Di Kec. Adiluwih Kab.Pringsewu." In *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif*, edited by LPPM Universitas Lampung, 1–10. Bandar Lampung: LPPM Universitas Lampung.
- Handayani, Sri, Fitriani, and Clara Yolandika. 2018. *Pengantar Koperasi Untuk Perguruan Tinggi*. Edited by UP2AI Politeknik Negeri Lampung. Bandar Lampung: UP Politeknik Negeri Lampung.
- Suhartini, Bambang Ali, Djohar Nuriati Retno, and Fahriyah. 2014. "Rekayasa Peningkatan Daya Saing Koperasi Pertanian Berbasis SDM Agropreneur."
- Suli, Dudi, Florjan Bombaj, Nevin Aliaj, and Hergys Suli. 2013. "A New Institutional Economics Approach to Contracts and Cooperatives." *Mediterranean Journal of Social Sciences* 83 (5): 1273–79. <https://doi.org/10.5901/mjss.2013.v4n9p64>.